

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
INTISARI.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Keaslian Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	18
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	19
1. Sejarah Pembentukan PPATK.....	19
2. Tugas dan Wewenang PPATK	22
B. Tindak Pidana Pencucian Uang dan <i>Cyberlaundering</i>	27
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	27
2. Pengertian <i>Cyberlaundering</i>	31

C. Uang dan Sistem Pembayaran Elektronik	32
1. Sistem Pembayaran Elektronik (Cyberpayment)	32
2. Sistem Kriptografi dalam Sistem Pembayaran Elektroni (Cyberpayment)	36
3. Macam Uang dalam Sistem Pembayaran Elektronik (Cyberpayment)	41
D. Pengertian dan Jenis Perampasan Aset (Asset Forfeiture)	45
1. Pengertian Aset	46
2. Pengertian Perampasan.....	48
3. Pembagian Jenis Perampasan Aset	50
E. Pengaturan Perampasan Aset di Indonesia	60
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	60
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	62
3. Di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.....	64
4. Di dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang..	83
F. Bantuan Hukum Timbal Balik atau <i>Mutual Legal Assistance</i>	93
1. Pengertian Bantuan Hukum Timbal Balik	93
2. Prinsip dan Syarat Bantuan Hukum Timbal Balik.....	94
3. Otoritas Pusat	97
G. Pengertian Modus Operandi	98
BAB III. METODE PENELITIAN	102

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN109

A. Modus Operandi dan Praktik Perampasan Aset Tindak Pidana

Pencucian Uang yang Menggunakan Teknologi Internet

(Cyberlaundering)..... 109

1. Kasus Cahya Fitriyanta.....111

2. Kasus Foshan Zebro128

B. Upaya yang Dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *Financial Intelligent Unit*

(FIU) dalam Pelaksanaan Perampasan Aset (Asset Forfeiture)

Tindak Pidana Pencucian Uang yang Menggunakan Teknologi

Internet (Cyberlaundering) di Indonesia135

1. Upaya PPATK melalui Implentasi Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang135

2. Upaya PPATK melalui Implementasi Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme143

3. Upaya PPATK melalui Peningkatan Dukungan Teknologi

bagi PPATK148

4. Upaya PPATK melalui Kerja Sama antar Lembaga Penegak

Hukum Terkait dan Mutual Legal Assistance (MLA).....160

5. Hambatan yang dihadapi Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pelaksanaan

Perampasan Aset (asset forfeiture) Tindak Pidana Pencucian

BAB V. PENUTUP188

A. Kesimpulan188

B. Saran189

DAFTAR PUSTAKA192

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Antara Skema Uang Digital dan Skema Uang

Virtual.....	45
--------------	----

Tabel 2. Perbedaan antara Perampasan Aset Secara In Personam Dengan

Perampasan Aset Secara In Rem.....	59
------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses Pencucian Uang	31
Gambar 2. <i>Cyberpayment System and Payment System Dynamic</i>	35
Gambar 3. Sistem <i>E-banking</i>	109
Gambar 4. <i>Peer To Peer Model</i>	114